

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik etis atau disebut juga politik balas budi, dikutip dari web Kebudayaan Kemdikbud bahwa politik etis merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral kepada kesejahteraan rakyat Nusantara¹. Pada masa peralihan dari abad ke-19 ke abad-20an, politik etis ini berkembang bersamaan dengan perubahan arah baru dari politik kolonial partai Belanda kala itu, politik ini juga dinamakan dengan politik Kolonial dari pada Pendidikan moral. Mengutip dari buku karya Sartono Kartodirdjo, bahwa Politik Etis juga disebut dengan politik paternaslisasi atau perlindungan karena rakyat Indonesia dalam pemerintahan hanya dianggap sebagai objek daripada partisipan. Namun dengan adanya Politik Etis tersebut tentu saja berhasil membuat perubahan baru terhadap rakyat Nusantara, salah satunya adalah munculnya berbagai macam kalangan yang terdidik, adanya saluran irigasi untuk pertanian dan perkebunan, juga terjadinya perpindahan penduduk dalam transmigrasi².

Lahirnya politik etis didasari karena adanya “perasaan dosa” terhadap politik kolonial pada masa sebelumnya, hal lain pun karena adanya kesadaran akan sebuah keadilan dan rasa tanggung jawab terhadap kemakmuran rakyat. Namun dengan lahirnya pergerakan nasional dapat memberikan arah terhadap politik kolonial, terutama terhadap rasa dan pemikiran yang telah sadar akan nilai dan kekuatannya sendiri. Dengan munculnya hal tersebut maka pemerintah kolonial dalam menghadapi masalah pergerakan nasional pun melakukan peninjauan ulang terhadap pergerakan politik yang dilakukan kaum pribumi. Oleh karena itu

¹ Museum Kepresidenan, “Politik Etis, Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional,” [kebudayaan.kemdikbud.go.id](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/politik-etis-sebagai-awal-lahirnya-tokoh-tokoh-pergerakan-nasional/), 2019, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/politik-etis-sebagai-awal-lahirnya-tokoh-tokoh-pergerakan-nasional/>.

² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, 3rd ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 50.

pemerintah kolonial menetapkan Kembali pendirian baru, pemikiran baru terkait hubungan antara negeri induk dan jajahannya³.

Pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda masih memberlakukan sistem sentralisasi, lalu sistem birokrasinya yang kaku ini memunculkan adanya perubahan dalam pemerintahan menjadi sistem desentralisasi. Dengan perubahan desentralisasi ini pihak Hindia Belanda membentuk *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang terdiri dari kalangan *elite* politik, hal ini dapat menanamkan pola-pola pemikiran barat dalam bidang perpolitikan. Akan tetapi dengan terbentuknya dewan-dewan rakyat ini mengakibatkan sebuah perpecahan dan perbedaan pendapat dari berbagai golongan rakyat, sehingga menumbuhkan diskriminasi.

Berjalannya politik etis ini berhasil dilancarkan oleh kaum pribumi dengan jiwa semangatnya yang berkobar, akan tetapi pada sekitar awal tahun kedua mulai menghilang dan terlaksananya sistem politik etis ini sudah diragukan. Setelah terjadinya perkembangan sosial-politik sejak Kebangkitan Nasional dan terjadinya Perang Dunia I yang menimbulkan situasi politik yang melemah termasuk politik etis. Pada tahun 1916 politik etis telah mengalami kebangkrutan dan hasil kemajuan yang telah terjadi bukan atas Haluan politik etis⁴.

Tujuan utama dari Hindia Belanda dalam menjalankan politik etis ini karena agar mendapatkan tenaga kerja yang murah. Namun pada akhirnya politik tersebut telah berhasil melahirkan kaum-kaum terpelajar, munculnya berbagai organisasi pergerakan dari orang-orang terdidik yang pada akhirnya menjadi penggerak dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Setelah kemunculan Pergerakan Nasional kesadaran rakyat dan kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan dikalangan kaum pribumi Kembali memuncak. Akan tetapi hal ini menjadikan tujuan dari politik etis telah diambil alih oleh pihak kaum pribumi sendiri, maka paternalism peran politik etis ini sudah tidak diberikan lagi oleh kaum Hindia Belanda. Tetapi pemerintah Hindia Belanda hanya mengawasi dan menjadi 'wasit' dalam terjadinya

³ Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 61–62.

⁴ Poesponegoro and Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*.

perkembangan dalam kekuatan sosial agar tetap berjalan dengan lancar dan sewajarnya tanpa adanya pertentangan satu sama lain⁵.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak organisasi-organisasi yang berdiri, mulai dari Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lainnya. Organisasi-organisasi ini muncul umumnya dengan tujuan untuk melawan kolonialisme, para tokoh-tokoh pejuang pun banyak yang melakukan kaderisasi. Seiring perkembangannya semakin banyak yang tersadarkan akan semangat juang nasionalisme, seperti yang awalnya kebanyakan organisasi hanya tergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Maka perlahan-lahan organisasi tersebut turut bergerak dan terjun ke dalam bidang politik, hal ini mereka lakukan demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sehubungan dengan bidang edukasi dalam politik etis, sejak memasuki abad ke-19 hingga ke-20 ketika masa pergerakan nasional masyarakat mendirikan berbagai macam Gerakan keorganisasian, selain itu juga bidang Pendidikan sudah mulai di fasilitasi untuk kaum pribumi dari para kolonial, termasuk perempuan. Sejak saat itulah banyak perempuan-perempuan yang bergerak pada bidang Pendidikan, hal ini karena adanya kesadaran bahwa Pendidikan dapat memberikan pengaruh yang besar. Adapun organisasi-organisasi wanita dalam bidang Pendidikan yang berhasil dibentuk, yaitu Organisasi Putri Mardika (Jakarta, 1912), Kartini Fonds (1913), Putri Budi Sejati (Surabaya), Keutamaan Istri (Jawa Barat), Sarekat Kaum Ibu Sumatra (Bukit Tinggi), Pikat (Minahasa), dan lainnya⁶.

Ketika berlangsungnya Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang mana dalam kongres tersebut berhasil menghasilkan ikrar Persatuan Sumpah Pemuda. Dalam kongres itu tidak sedikit perempuan yang hadir dan turut ikut serta. Setelah itu citra kaum perempuan pun semakin berkembang, maka dampak dari hal tersebut masyarakat semakin sadar akan kesatuan nasional. Sehingga pada tanggal 22-26 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia I di Yogyakarta yang dihadiri oleh organisasi wanita pada masa situ.

⁵ Ibid.

⁶ Nana Nurliana et al., *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), 7–8.

Pada akhir masa kekuasaan Kolonial Belanda, pergerakan kaum perempuan di Indonesia pun semakin meningkat termasuk tumbuhnya suatu kesadaran bahwa tidak ada hal-hal yang membedakan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajiban.

Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, Jepang berhasil mendoktrinasi berbagai hal termasuk kaum perempuan yang dilibatkan dalam perang melawan sekutu, karena hal ini berhasil meninggalkan banyak perubahan di Indonesia dan berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat akan jiwa nasionalisme⁷. Bahkan kepedulian terhadap kaum perempuan mulai tersadarkan dan seiring berjalannya waktu. Atas timbulnya kesadaran tersebut maka para kaum perempuan pun terus berusaha dengan giat untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk menghapus pola patriarki.

Perlu diketahui tidak hanya pada masa kolonial, tetapi pada masa kedudukan Jepang pun berhasil membentuk himpunan-himpunan dan untuk menampung kegiatan kaum perempuan, pemerintah Jepang pun membentuk *Fujinkai* yang berisi para istri pejabat pemerintahan dan pamongpraja yang nantinya menggerakkan tenaga wanita di wilayahnya masing-masing.

Namun berkaitan dengan hal tersebut, perempuan Indonesia tidak akan bisa mencapai kemerdekaannya apabila tidak ada sosok pelopor yang membela. Seperti yang telah dituliskan dalam sejarah, perempuan Indonesia dapat turut serta dalam masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang berhasil membawa perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya adalah Maria Ulfah.

Maria Ulfah merupakan seorang putri dari seorang Bupati Kuningan Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan R.A Hadidjah Djajadiningrat, Maria lahir di Serang, 18 Agustus 1911. Maria lahir dari keluarga yang sangat peduli akan Pendidikan, bahkan sekitar 1930-an Maria berhasil mengenyam Pendidikan di negeri Belanda tepatnya di Universitas Leiden. Ia seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum. Maria Ulfah berhasil menyelesaikan kuliahnya pada usia 22 tahun

⁷ Wulan Sondarika, "Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Maka Pendudukan Jepang," *Jurnal Historia* 5, no. 2 (2017): 207–17.

dan ia berhasil menyanggah gelar sarjana yang mana membuat dirinya menjadi sarjana wanita pertama di bidang hukum.

Selama berkuliah di Belanda, Maria Ulfah bersahabat dekat dengan para mahasiswa Indonesia, salah satunya dengan Sutan Sjahrir, K.H Agus Salim, Mohammad Hatta dan lainnya⁸. Kala itu Sutan Sjahrir mengajak Maria Ulfah ke pertemuan politik di Leiden, Liga Anti Kolonialisme, karena hal ini Maria pun menyadari akan kebebasan yang ia dapatkan sebagai kaum perempuan selama di Belanda. Pada Desember 1933 Maria Ulfah Kembali ke Tanah Air, ia pun semakin menyadari bahwa terdapat perbedaan terkait kebebasan kaum perempuan dari yang ia dapatkan di Belanda dengan di Tanah Air, Indonesia. Karena hal ini ia bercita-cita untuk menghapuskan ketidakadilan perlakuan terhadap kaum perempuan dan juga ingin memajukan rakyatnya, khususnya kaum wanita yang masih kurang pendidikannya. Setelah kepulangannya ke Tanah Air Maria Ulfah sangat aktif dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, politik, dan sosial. Hal tersebut Maria jalani demi tercapainya cita-cita yang ia dambakan, terutama tentang hak kaum perempuan dan kemajuan Bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut Maria Ulfah membangun kiprahnya dalam pentas perpolitikan dan berhasil bergabung ke dalam berbagai peran politik nasional di Indonesia. Kesadarannya dalam memperjuangkan kedudukan wanita Maria Ulfah berhasil mendirikan biro konsultasi hukum kaum wanita dan Maria Ulfah sendiri yang menanganinya. Pada Kongres Perempuan Indonesia III Maria Ulfah turut serta dalam mencetuskan gagasannya dan menyusun Undang-Undang Perkawinan untuk umat Islam. Setelah masuk masa kedudukan Jepang Maria Ulfah masih tetap berperan aktif dalam pentas politik nasional yakni pada BPUPKI dimana Maria Ulfah didalamnya bekerja sebagai anggota, Maria turut serta Menyusun dan merancang Undang-Undang Dasar.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan Maria Ulfah tidak berhenti sampai disitu. Perpolitikan Indonesia pada masa permulaan Maria Ulfah ditunjuk dan menjabat sebagai Menteri Sosial pada

⁸ MPB Manus et al., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 110.

masa Kabinet Sjahrir II dan III, karena kedudukannya inilah Maria Ulfah berhasil membantu kaum perempuan pada Kongres Wanita Indonesia (KORWANI). Kemudian salah satu usaha perjuangan KORWANI yang dibantu oleh Maria Ulfah, yakni berhasil memberikan sebuah gagasan dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk turut bergabung ke dalam ABRI yang mana pada saat itu Maria Ulfah yang langsung menghadap Jenderal Nasution yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karena peranannya sebagai Menteri Sosial memberikan dampak yang baik maka Maria Ulfah kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Menteri pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin, kemudian naik jabatan sebagai Direktur Kabinet.

Adapun Batasan kajian dalam penulisan ini yakni terdiri dari dua Batasan, yakni ruang dan waktu. Batasan pada penulisan ini penulis berfokus pada kajian tahun 1935-1973 untuk melihat dinamika dari peran Maria Ulfah dalam bidang politik di Indonesia yang mana pada tahun 1935 ditandai dengan awal mulanya Maria Ulfah terjun ke dalam bidang politik di Indonesia, yaitu pada Kongres Perempuan Indonesia II (KPI II). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena merupakan sebuah awal mula karier Maria Ulfah di Bidang Politik Indonesia. selanjutnya kajian ini dibatasi hingga tahun 1973 karena ditahun ini merupakan tahun akhir atau masa pensiun Maria Ulfah berkiprah dalam perpolitikan Indonesia. Karier politiknya berakhir pada masa kedudukannya sebagai anggota dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Terdapat beberapa alasan penting, mengapa penulis tertarik dalam mengkaji bahasan “Peran Maria Ulfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia”. *Pertama*, belum banyak yang mengenal sosok dari Maria Ulfah yang ternyata merupakan seorang perempuan pertama yang duduk dikursi pemerintahan pada era Kabinet Sjahrir⁹. *Kedua*, karena banyaknya peran politik yang telah Maria Ulfah jalani maka dalam pencarian sumber pun tidak terlalu sulit. *Ketiga*, hal ini menjadi suatu yang baru dan menarik karena kita dapat mengenal sosok Maria Ulfah lebih dekat karena keaktifan dan perannya dalam bidang politik di Indonesia.

⁹ Ibid, 111.

Berkaitan dengan rentan tahun dan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas peran dari Maria Ulfah dalam Bidang Politik Nasional di Indonesia. Untuk peranan Maria Ulfah pada kajian ini penulis menjelaskan terkait keterlibatannya diberbagai bidang, kongres-kongres, keorganisasian. Keterlibatannya ini berkaitan dengan hak kedudukan dan kemajuan bangsa di bidang politik Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul *“Peran Maria Ulfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia Tahun 1935-1973”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka telah didapat beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana biografi Maria Ulfah?
2. Bagaimana Peran Maria Ulfah pada pentas politik Nasional Indonesia tahun 1935-1973?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang biografi dari sosok Maria Ulfah.
2. Untuk menganalisis dan memahami peran Maria Ulfah pada pentas politik nasional Indonesia tahun 1935-1973.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri beberapa sumber kepustakaan. Penulis berhasil menemukan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tema dan topik kajian yang akan penulis tuliskan. Berikut kepustakaan yang telah penulis dapatkan, diantaranya:

a) Buku

1. Karya buku yang dituliskan oleh Gadis Rasid ini diterbitkan pada 1982 dengan judul “Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya.” Isi kajian dari buku ini menjelaskan tentang Maria Ullfah, mulai dari latar

belakang keluarga, didikan dari kedua orang tua Maria Ullfah, khususnya dari sang ayah yang membebaskan Maria Ullfah untuk memilih jalan hidupnya sendiri, hingga Maria Ullfah berkuliah di Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Hingga akhirnya Maria memiliki pemikiran terkait kebebasan dan kesetaraan hak perempuan di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan terkait perjalanan karir politik Maria Ullfah, hingga Maria Ullfah berhenti atau pension dari dunia politik Indonesia. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang sedang penulis kaji, yaitu pada buku ini tidak dijelaskan secara terperinci terkait peran yang dilakukan Maria Ullfah dalam dunia perpolitikan.

b) Skripsi

1. Skripsi dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Peran Maria Ullfah Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988” ini ditulis oleh Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu pada tahun 2014. Isi dari skripsi ini membahas tentang peran Maria Ullfah dalam politik di Indonesia tetapi hanya di fokuskan kepada perjuangan Maria Ullfah dalam hak-hak perempuan hingga wafatnya Maria Ullfah pada tahun 1988. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti ini, penulis berfokus pada peran Maria Ullfah di perpolitikan di Indonesia sampai Maria Ullfah pensiun dari dunia politik yakni tahun 1973.
2. Skripsi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Peran Maria Ulfah di Bidang Sosial-Keagamaan (1935-1988)” milik Lismaya Yakutati Ismatilah ini ditulis pada 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang peranan Maria Ullfah pada bidang Sosial dan Keagamaan yang mana isinya membahas terkait biografi dan juga perjalanan karir dari Maria Ullfah dalam upaya meningkatkan kapasitas kaum perempuan khususnya di Indonesia. Penulisan ini mulai dari biografi tentang Maria Ullfah terkait latar belakang Pendidikan, keluarga, dan pemikiran. Adapun dibahas terkait keadaan perempuan pada bidang

sosial-keagamaan dan juga kontribusi Maria Ullfah didalamnya. Sedangkan perbedaan antara kajian yang penulis bahas dengan skripsi ini adalah bahwa penulis hanya berfokus pada setiap peran yang dilakukan Maria Ullfah dalam dunia kancah politik di Indonesia dari 1935-1978.

c) Jurnal

1. Jurnal karya Laksmi Hestirani dengan judul “Pemikiran Maria Ullfah Santoso Tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941)”, jurnal ini ditulis pada tahun 2020. Jurnal ini berisikan tentang sejarah pemikiran dari Maria Ullfah Santoso dalam memperjuangkan hak pilih perempuan di Indonesia pada masa Kolonial Belanda, terutama tentang hak perempuan pada hak pilih pasif. Serta pemikiran Maria Ullfah tentang keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Perbedaan bahasan yang penulis tulis dengan jurnal ini bahwa yang penulis kaji hanyalah terkait peran Maria Ullfah pada dunia perpolitikan di Indonesia, sedangkan jurnal ini hanya terfokus pada kajian pemikiran dari Maria Ullfah tentang Hak Pilih Perempuan.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah prosedur untuk membuat dan Menyusun suatu hal agar prosedur tersebut dapat teratur dan terencana. Metode Penelitian Sejarah sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Maka berikut penulis paparkan secara terperinci sebagai berikut:

1.5.1 Heuristik

Tahapan heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah. Heuristik merupakan tahapan awal dalam mengumpulkan berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan kajian atau topik yang akan diteliti. Dalam tahapan mencari sumber ini harus terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Kuntowijoyo, sumber primer dapat berupa sumber lisan yang mana harus

didapatkan secara lisan. Sedangkan dalam bentuk tertulis dapat berupa koran, majalah, buku-buku, dokumen tertulis, dan *artifact*¹⁰.

Pada tahapan heuristik atau pengumpulan sumber ini penulis berhasil mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik kajian yang akan diteliti seperti arsip, dokumen, buku-buku, *microfilm*, foto-foto, dan sumber artikel. Untuk sumber-sumber yang telah didapatkan penulis yakni dalam bentuk digital dan cetak. Sumber-sumber ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PEPRUSNAS), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepustakaan Kongres Wanita Indonesia (Kepustakaan KOWANI), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat (DISPUSIPDA), dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (DISARPUS). Adapun beberapa buku lain yang merupakan koleksi milik pribadi dan beberapa sumber yang berasal dari berbagai artikel jurnal dan *website*.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang disampaikan oleh saksi mata¹¹. Dengan kata lain sumber primer juga merupakan sebuah bukti tertulis dari tangan pertama terkait peristiwa sejarah yang dibuat berdasarkan terjadinya peristiwa tersebut atau saksi matanya mengalami/sezaman dengan peristiwa tersebut¹². Untuk sumber primer yang telah penulis kumpulkan, yakni terdiri dari arsip dokumen, surat kabar, foto-foto sezaman lainnya sebagai berikut.

a) Buku

1. Gadis Rasid. 1982. *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang.
2. Maria Ulfah Subadio. “Bung Sjahrir”, editor H. Rosihan Anwar dalam *Mengenang Sjahrir*. 2010. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 73.

¹¹ Ibid, 75.

¹² Dedi Irwanto and Alian Sair, *Metodologi Dan Historiografi Sejarah* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2014).

3. Ny. Maria Ulfah Subadio, S.H., *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan (Suatu Pengalaman)*. 1981. Jakarta: Yayasan Idayu.

b) Arsip Dokumen

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 285. 1946. *Surat Putusan Presiden, Maklumat Presiden No. 2*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Kementrian Penerangan No. 239. 1947. *Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Kabinet Presiden RI No. 2044. 1957. *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
4. Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 49a. 1950. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Tahun 1950*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
5. Surat Kabar Sipatahoenan No. 163 tahun ke 15. Terbit Minggu 24 Juli 1938.
6. Surat kabar Sipatahoenan No. 164 tahun ke 15. Terbit Senin, 25 Juli 1938.
7. Surat Kabar Sipatahoenan No. 165 tahun ke 15. Terbit Selasa, 26 Juli 1938.
8. Surat Kabar Pemandangan No. 160 tahun ke 6. Terbit Kamis, 21 Juli 1938.
9. Surat Kabar Pemandangan No. 166 tahun ke 6. Terbit Kamis, 28 Juli 1938.
10. Majalah Doenia Kita No. 4 Tahun ke II. “njonjah Mr. Maria Ulfah Santoso dan Kaoem iboe Sumatra.” Terbit Februari 1939. 1-2
11. Madjalah Doenia Kita No. 1 Tahun ke III. “Rapat Oemoem „Hari Iboe”. Terbit September 1940. 10

12. Madjalah Doenia Kita Tahun ke IV. "Perempoean dalam Dewan Rakjat". Terbit Januari 1941. 3-4.
13. Madjalah Doenia Kita Tahun ke IV. "Soal „Kawin Gantoeng". Terbit 1941. 3.
14. Surat kabar Asia-Raya No. 103 Tahun ke IV. "Anggota² dari „ Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan". Terbit Minggu, 29 April 2605.

c) Media Digital

1. Sejarah Lisan Tahun 1973-1944 No. 154. *Maria Ulfah-Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*. Tahun 1983. Arsip Nasional Republik Indonesia, Maria Ulfah.
2. Foto digital. *Didepan Sekolah Menengah Muhammadiyah (bersama rekan mengajarnya)*. 1934. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
3. Foto digital. *Komisi Tiga Negara mengunjungi Pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan di Bangka*. 15 Januari 1949. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
4. Foto digital. Ny. *Maria Ulfah Soebadio, SH berjabat tangan dengan Pangeran Bernhard tampak menyaksikan Dubes Belanda Janikh, Soebadio, ny. Poppy Sjahrir*. 1978. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahan campuran.
5. Foto digital. *Menteri Sosial Mr. Maria Ulfah Santoso (dalam sidang terakhir kabinet Sutan Sjahrir)*. 27 Juni 1947. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahan campuran.
6. Foto digital. *Maria Ulfah bersama teman-temannya di rumah*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahan campuran.

7. Foto digital. *Maria Ulfah semasa kecil bersama saudara dan kedua orang tuanya*. 1948. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahan campuran.
8. Foto digital. *Gambar bersama Maria Ulfah (guru) & Siti Sundari pada musim dingin di Stasiun Kereta Api Leiden akan menuju Amsterdam untuk menghadiri promosi Dr. Ida Istarun Al Rasjid seorang dokter wanita pertama di Indonesia*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahan campuran.
9. Foto digital. *Kongres Wanita di Jakarta*. November 1950. Kepustakaan KOWANI, koleksi gambar.
10. Foto digital. *Delegasi KOWANI ke Kongres Wanita Asia Afrika Colombo*. 1958. Kepustakaan KOWANI, koleksi gambar.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang berkaitan dengan bukti-bukti dari sumber primer¹³. Menurut Kuntowijoyo, sumber sekunder adalah yang disampaikan bukan oleh saksi mata¹⁴. Maka sumber sekunder adalah sumber yang bukan dari seseorang yang sezaman dengan peristiwa sejarah atau seseorang yang tidak mengalami langsung peristiwanya. Berikut beberapa sumber sekunder yang telah penulis kumpulkan, yakni sebagai berikut:

1. Cora Vreede-De Stuers. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
2. Harry A. Poeze. (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: KPG Bekerjasama dengan KITLV.

¹³ Ibid.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 75.

3. KOWANI. (2009). *80 Tahun KOWANI. Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
4. Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, cet-2.
5. Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
6. Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Imperialisme Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
7. M.C. Ricklefs. (1994). *Sejarah Indonesia Modern* (terj. Dharmono Hardjowodjono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
8. Marwati Djoened; Poesponegoro; Nugroho Notosusanto. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
9. Hidayat Mukmin. (1980). *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia: Suatu Pendekatan Deskriptif Komparatif*. Bandung: Binacipta.
10. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. *Maria Ulfah: Tokoh Pejuang Kemerdekaan Wanita dan Bangsa*, dipublikasikan pada 22 Desember 2017. (sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/maria-ulfah-tokoh-pejuang-kemerdekaan-wanita-dan-bangsa/>)
11. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. *Sejarah Hari Ibu Menjadi Hari Besar Nasional*. Dipublikasikan pada 22 Desember 2019. (sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/sejarah-hari-ibu-menjadi-hari-besar-nasional/>)
12. Wildan Sena Utama. *Maria Ulfah dan Dunia Poskolonial Asia yang Humanis*. Dipublikasikan pada 9 Maret 2022. (sumber:

<https://www.universiteitleiden.nl/leiden-indonesia/news/2022/maria-ulfah-dan-dunia-poskolonial-asia-yang-humanis>)

1.5.2 Kritik

Tahapan kritik merupakan tahapan yang mana sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam berbagai bentuk tertulis maupun digital tersebut diverifikasi atau dikritisi, baik dari segi ekstern maupun segi intern¹⁵. Menurut Kuntowijoyo, kritik sumber memiliki dua bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Hal ini perlu dilakukan sebab sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan tersebut tidak dapat langsung digunakan. Karena harus dilakukan tahapan terkait keaslian atau kebenaran dari sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dalam mengkritisi sumber yang telah dikumpulkan, kemudian di verifikasi keasliannya atau kebenarannya:

1) Kritik Ekstern

Kritik ekstern sendiri yaitu melakukan kritik sumber dengan cara menyeleksi dan memilah sumber melalui bentuk fisik dari sumber yang telah diperoleh. Untuk membuktikan keaslian sumber, maka sumber-sumber berupa surat, notulen, dan daftar tersebut harus diteliti mulai dari kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya, hal ini guna untuk mengetahui autentisitasnya atau keasliannya¹⁶.

Hal ini serupa dengan sumber-sumber yang telah penulis kumpulkan sebagai sumber primer pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Buku yang ditulis oleh Gadis Rasid dengan judul *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* ini di terbitkan pada 1982. Buku ini penulis gunakan sebagai sumber primer karena buku ini masih sezaman dengan tokoh yang akan penulis teliti, yang mana perlu

¹⁵ Johan Wahyudhi M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, I (Jakarta: KENCANA, 2014), 223.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 77.

diketahui bahwa Maria Ullfah meninggal pada 1988. Selain itu buku ini terdiri dari 12 BAB. Jika dilihat dari bentuk fisiknya buku ini masih layak dijadikan sebuah sumber, karena gaya tulisan yang masih dapat dibaca dan Bahasa yang digunakan pun menggunakan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa buku ini masih layak dijadikan sebuah sumber dan dapat terjamin keasliannya.

- b) Buku yang di editor oleh H. Rosihan Anwar dengan judul *Mengenang Sjahrir* ini didalamnya memuat sebuah tulisan yang ditulis oleh Maria Ullfah yang berjudul “Bung Sjahrir”. Buku yang penulis merupakan cetakan terbaru tahun 2010. Buku ini masih sangat layak dijadikan sebuah sumber, karena bentuk fisiknya yang masih sangat baik serta tulisan yang dapat terbaca dengan jelas, Bahasa yang digunakan pun menggunakan Bahasa Indonesia. Buku ini berjumlah 469 halaman, akan tetapi tulisan yang dimuat oleh Maria Ullfah hanya berjumlah 6 halaman. Maka dapat dipastikan bahwa buku ini masih layak dijadikan sumber sejarah dan dapat terjamin keasliannya.
- c) Buku dengan judul *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan* ini merupakan suatu pengalaman yang dialami langsung oleh Maria Ulfah. Buku ini merupakan terbitan tahun 1981, bentuk fisik dari buku ini masih sangat layak dijadikan sebuah sumber Sejarah karena tulisannya masih dapat dibaca dengan jelas, Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia. Buku ini terdiri dari 80 halaman. Maka dapat disimpulkan bahwa buku ini masih layak dijadikan sebuah sumber dan dapat terjamin ke asliannya.
- d) Arsip yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 285 ini merupakan sebuah *Surat Putusan Presiden, Maklumat Presiden No. 2* yang penulis dapatkan dalam bentuk digital dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam arsip tersebut

tertulis bahwa arsip ini dikeluarkan di Yogyakarta, pada 2 Oktober 1946. Arsip ini merupakan arsip statis. Jika dilihat dari kondisinya arsip ini masih cukup layak untuk dijadikan sebuah sumber karena meskipun pinggiran kertas dari arsip ini sedikit sobek, tetapi tulisan yang masih menggunakan mesin *tik* tersebut masih dapat terbaca dengan jelas. Dalam arsip ini terdiri dari 7 lembar, yang mana berisi beberapa copy (asli) susunan Kabinet Sjahrir. Untuk kondisi kertasnya berwarna coklat kekuningan. Maka dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber arsip ini masih layak dijadikan sumber dan dapat terjamin keasliannya.

- e) Arsip yang dikeluarkan oleh Kabinet Presiden RI No. 2044 ini Bernama *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Indonesia* yang penulis dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam arsip ini tertulis bahwa arsip ini ditulis di Jakarta pada 11 Maret 1957. Arsip ini merupakan arsip statis. Jika dilihat dari bentuknya arsip ini masih layak dijadikan sumber karena kondisi tulisan yang masih dapat terbaca dengan jelas, bentuk tulisan dalam arsip ini ditulis menggunakan mesin tik, dalam satu *file* arsip ini terdiri dari 2 lembar dengan kondisi kertas yang berwarna coklat kekuningan. Menyimpulkan dari pernyataan diatas, maka arsip ini masih layak dijadikan sumber sejarah dan dapat terjamin keasliannya.
- f) Arsip yang dikeluarkan oleh Kementrian Penerangan No. 239 ini merupakan sebuah berkas mengenai *Jatuhnya Kabinet Sjahrir*, arsip ini penulis dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam arsip ini tertulis bahwa arsip ini di tanda tangani di Garut pada 22 Juli 1947. Berkas arsip ini terdiri dari 3 lembar. Jika dilihat bentuk tulisannya, arsip ini dimuat dengan menggunakan mesin tik dan menggunakan ejaan lama. Bentuk fisik dari kertasnya coklat kekuningan, akan tetapi pada lembaran laporan kertas ini tembus pandang. Arsip ini terdapat coretan-coretan di lembaran awal dan

sisi-sisi lembaran selanjutnya, namun tulisannya masih dapat terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa arsip ini dapat menjadi sebuah sumber yang terjamin keasliannya.

- g) Arsip yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 49a ini merupakan sebuah *Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat* Tahun 1950. Arsip ini penulis dapatkan dari *website* resmi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam bentuk digital dengan format PDF. Arsip ini terdiri dari 1lembar saja. Jika dilihat dari bentuk fisiknya, bentuk kertasnya telah berwarna kecoklatan. Bentuk tulisannya dimuat dengan mesin tik dan menggunakan ejaan lama yang masih dapat terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa arsip ini dapat menjadi sebuah sumber yang terjamin keasliannya.
- h) Surat Kabar lama dari Sipatahoenan No. 163 tahun ke 15 yang penulis dapatkan ini diterbitkan pada Minggu, 24 Juli 1938. Penulis mendapatkan sumber ini dalam bentuk digital yang berasal dari KHASTARA Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Surat kabar lama ini terdiri dari 4 halaman yang menggunakan ejaan lama dengan warna kertasnya yang berwarna putih karena hasil digitalisasi, namun jika dilihat dari bentuk tulisannya masih dapat terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.
- i) Surat Kabar lama dari Sipatahoenan No.164 tahun ke 15 yang penulis dapatkan ini diterbitkan pada Senin, 25 Juli 1938. Penulis mendapatkan sumber ini dalam bentuk yang telah digitalisasi dari *website* KHASTARA Perpustakaan Nasional RI. Surat kabar lama ini terdiri dari 8 halaman yang masih menggunakan ejaan lama dalam Bahasa Sunda, bentuk dari kertasnya berwarna putih karena telah digitalisasi, namun jika dilihat dari bentuk tulisannya surat kabar lama ini masih dapat terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.

- j) Surat Kabar lama dari Sipatahoenan No. 165 tahun ke 15 yang penulis dapatkan ini diterbitkan pada Selasa, 26 Juli 1938. Penulis mendapatkan sumber ini dalam bentuk yang telah digitalisasi melalui *website* KHASTARA Perpustakaan Nasional RI. Surat kabar lama terbitan ini terdiri dari 8 halaman yang masih menggunakan ejaan lama dalam Bahasa Sunda. Bentuk kertas dari sumber ini berwarna putih karena telah digitalisasi, lalu dari bentuk tulisannya sendiri masih dapat terbaca dengan jelas. Maka sumber ini dapat terjamin keasliannya.
- k) Surat kabar lama dari Pemandangan No. 160 tahun ke 6 ini penulis dapatkan dari *website* KHASTARA Perpustakaan Nasional RI dalam bentuk yang telah digitalisasi. Surat kabar lama ini diterbitkan pada Kamis, 21 Juli 1938. Surat kabar lama ini terdiri dari 10 halaman yang masih menggunakan ejaan lama dalam Bahasa Indonesia. Warna dari digitalisasinya berwarna kecoklatan dengan tulisan yang masih bisa terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.
- l) Surat kabar lama dari Pemandangan No. 166 tahun ke 6 ini penulis dapatkan dari *website* KHASTARA Perpustakaan Nasional RI dalam bentuk yang telah digitalisasi. Surat kabar lama ini diterbitkan pada Kamis, 28 Juli 1938. Surat kabar lama ini terdiri dari 10 halaman yang masih menggunakan ejaan lama dalam Bahasa Indonesia. Warna dari digitalisasi sumber ini berwarna kecoklatan dengan tulisan yang masih dapat terbaca dengan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.
- m) Majalah Doenia Kita ini berhasil penulis dapatkan dari PERPUSNAS dalam berbentuk *microfilm*, namun penulis mendapatkannya dalam bentuk fotokopi dikertas HVS ukuran A4 hitam putih. Majalah Doenia Kita yang penulis dapatkan ini merupakan terbitan tahun 1939-1941. Untuk kondisi fisik dalam

microfilmnya sendiri masih dalam keadaan baik, untuk tulisan didalamnya berwarna kekuningan dengan tulisan yang masih dapat terbaca jelas. Bahasa yang tertulis pun menggunakan Bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.

- n) Surat Kabar Asia-Raya No. 103 tahun ke IV ini merupakan surat kabar masa penjajahan Jepang. Surat kabar ini penulis dapatkan secara digital melalui KHAJASTARA Perpustakaan Nasional RI. Surat kabar ini diterbitkan pada 29 April 1945 (1945). Surat kabar yang penulis dapatkan terdiri dari 2 halaman yang mana beberapa tulisannya kurang jelas atau sedikit pudar, warna dari digitalisasi surat kabar ini yaitu hitam putih. Untuk Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat terjamin keasliannya.
- o) Sejarah Lisan tahun 1944-1973 No. 154 terdiri dari 2 bentuk, yaitu berbentuk pita kaset yang terdiri dari 6 buah kaset rekaman yang dalam 1 kasetnya terdiri dari *side A* dan *side B* dan bentuk lainnya yaitu dalam bentuk kaset *CD*. Sumber ini berupa rekaman suara wawancara antara Maria Ullfah dengan Dewi Fortuna Anwar. Dokumen rekaman ini penulis dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Bentuk fisik dari rekaman ini dalam keadaan baik bahkan suara dari rekamannya masih dapat didengar dengan jelas, meskipun ada beberapa bagian samar-samar karena tertutup suara angin dan kendaraan yang lalu lalang. Rekaman wawancara ini resmi diarsipkan pada tahun 1983. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini dapat dipercaya dan terjamin keasliannya.

2) Kritik Intern

Pada tahapan kritik intern selanjutnya merupakan tahapan untuk mengkritisi sumber yang telah diperoleh untuk memahami dan memverifikasi isi dari sumber yang telah didapatkan. Setelah sumber yang diperoleh melewati tahapan kritik ekstern, maka harus diteliti Kembali isi

terkait keabsahan/kebenaran dari sumber yang sebelumnya telah diperoleh¹⁷.

Menurut Dudung Aburrahman, kritik sumber intern ini perlu karena untuk mencegah adanya kekeliruan sumber maka alangkah baiknya untuk melakukan penelitian kritik intern pada sumber yang telah dimiliki, guna untuk menelusuri kredibilitas pada sumber¹⁸. Mengikuti pernyataan tersebut, maka penulis akan melakukan Langkah kritik intern pada sumber yang telah dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Buku dengan judul *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* ini ditulis oleh Gadis Rasid, yang merupakan seorang wartawan perempuan yang turut berjuang akan kemerdekaan Indonesia. Buku yang ditulisnya ini berisikan tentang Maria Ulfah dan perjuangannya dalam membela kaum perempuan. Garis besar buku yang ditulisnya ini Sebagian besar bersumber dari wawancara yang dilakukan Dewi Fortuna dan Maria Ulfah, namun agar tulisannya semakin kongkret dan faktual Gadis Rasid juga secara langsung datang ke kediaman Maria Ulfah.
- b) Buku dengan judul *Mengenang Sjahrir* ini sebenarnya merupakan buku tentang Sutan Sjahrir, hanya saja karena Maria Ulfah merupakan sahabat dari Sjahrir maka dalam buku ini dimuat sebuah tulisan dengan judul “Bung Sjahrir” oleh Maria Ulfah. Isi dari tulisan yang dimuat ini terkait pandangan Maria Ulfah tentang Sjahrir termasuk bagaimana Maria Ulfah menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir II dan III. Buku ini di editor oleh H. Rosihan Anwar (1922-2011) yang merupakan seorang tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan juga budayawan dari Indonesia.
- c) Buku dengan judul *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan (Sebuah Pengalaman)* merupakan sebuah buku yang berisikan pengalaman langsung Maria Ulfah tentang perjuangan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dudung Aburrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

beliau dalam Menyusun dan mencapai undang-undang perkawinan mulai dari mimpi, rencana, sistematika dari perundang-undangan perkawinan itu sendiri, isinya (pasal-pasal), hingga pengesahan undang-undang tersebut. Pengalaman tentang ini ia kemukakan di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta pada 28 Februari 1981. Dalam buku ini juga disertai dengan beberapa dokumen foto-foto yang berkitan.

- d) Arsip No. 285 ini merupakan sebuah Surat Putusan Presiden yang ditanda-tangani oleh Soekarno kala itu yang merupakan surat maklumat berisikan susunan anggota untuk Kabinet Sjahrir pada tahun 1946 yang mana didalamnya tertulis bahwa Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial.
- e) Arsip No. 2044 ini merupakan surat pernyataan dari Kabinet Presiden RI tentang Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis Indonesia yang dialami Maria Ullfah, surat pernyataan ini resmi ditanda tangani oleh Istri Sutan Sjahrir yaitu Siti Wahyunah. Dalam pernyataan ini terdapat 2point terkait ha katas kaum perempuan.
- f) Arsip dokumen No. 239 ini merupakan surat pernyataan dari Kementrian Penerangan tentang Jatuhnya Kabinet Sjahrir. Surat pernyataan ini berisikan tentang laporan pernyataan yang memuat ketidak setujuan terhadap kabinet Sjahrir kala itu.
- g) Arsip dokumen No. 49a ini merupakan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Surat keputusan ini memuat keputusan tentang diangkatnya Maria Ullfah sebagai Sekretaris I Perdana Menteri bersama Soemardi sebagai Sekretaris II pada Kabinet Amir Sjarifuddin.
- h) Surat kabar lama dari Sipatahoenan No. 163 ini berisikan laporan terkait Kongres Perempuan Indonesia III. Laporan yang dimuat pada surat kabar terbitan 24 Juli 1938 ini dijelaskan secara

terperinci hingga kepada susunan acara dan isi dari kongres perempuan III.

- i) Surat kabar lama dari Sipatahoenan No. 164 dan 165 ini merupakan surat kabar lanjutan hanya saja penerbitannya dijadikan berkala yaitu pada 25-26 Juli 1938. Surat kabar ini memuat rangkaian Kongres Perempuan Indonesia III yang berisi laporan dan pidato dari tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya, termasuk Maria Ulfah.
- j) Surat kabar lama dari Pemandangan No. 160 ini merupakan surat kabar yang memuat laporan tentang Kongres Perempuan III. Surat kabar ini resmi diterbitkan pada Kamis, 21 Juli 1983. Dalam surat kabar ini memuat tentang program juga pidato dari tokoh-tokoh yang terlibat termasuk Maria Ulfah.
- k) Surat Kabar lama dari Pemandangan No 166 ini merupakan surat kabar yang memuat Kongres Perempuan Indonesia III. Dalam surat kabar tersebut memuat terkait kongres perempuan yang didalamnya terdapat pidato dari Maria Ulfah.
- l) Majalah Doenia Kita merupakan sebuah majalah kaum ibu Sumatera, tulisan-tulisan yang penulis dapatkan dari majalah ini hanya tentang Maria Ulfah saja. Adapun tulisan dengan judul “njonjah Mr. Maria Ulfah Santoso dan kaoem iboe Sumatra”, merupakan sebuah tulisan tentang dukungan dari perkumpulan Sarikat Kaoem Iboe Soematra yang mengajukan Maria Ulfah untuk duduk dikursi *Volksraad* pemerintahan. Adapun pada kolom bawahnya merupakan pernyataan anjuran dan dukungan untuk Maria Ulfah duduk dikursi pemerintahan *Volksraad* yang dinyatakan langsung oleh ketua dari pengurus besar Istri Indonesia di Semarang pada 23 Januari 1939.
- m) Majalah Doenia Kita terbitan tahun 1939 dengan judul tulisannya “Rapat Oemoem „Hari Iboe” merupakan sebuah pernyataan Maria Ulfah tentang Hari Ibu.

- n) Majalah Doenia Kita terbitan Januari 1941 ini terdapat sebuah tulisan berisikan pidato dari Maria Ullfah dengan judul “Perempoean dalam Dewan Rakjat” tulisan ini berisikan sebuah pidato tentang wanita yang wajar saja apabila berada dikursi Dewan Rakyat karena seorang wanita pun berhak atas haknya untuk berada dalam Dewan Rakyat.
- o) Majalah Doenia Kita terbitan November 1941 ini terdapat sebuah tulisan yang berisikan pidato dari Maria Ullfah dengan judul “Soal „Kawin Gantoeng”. Tulisan ini berisikan sebuah pidato dari Maria Ullfah terkait Kawin Gantung terhadap seorang perempuan yang masih dibawah umur.
- p) Surat kabar lama dari Asia-Raya No. 103 tahun ke IV ini merupakan surat kabar pada masa tantara Jepang yang mana pada terbitan ini berisikan terkait BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
- q) Surat kabar lama Penjebar Semangat No. 34 tahun ke VII ini terbit ketika Hari Kartini, namun dalam terbitan ini terdapat salah satu tulisan dari Maria Ullfah. Tulisan ini berbicara tentang kemajuan wanita Indonesia pada masa R.A Kartini di abad 19.
- r) Sejarah Lisan tahun 1944-1973 No. 154 yang penulis dapatkan ini merupakan sebuah rekaman wawancara langsung antara Maria Ullfah sebagai pembicara dan Dewi Fortuna sebagai pewawancara. Rekaman sejarah lisan ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu pada bagian pertama berisikan tentang perjalanan Maria Ullfah mulai dari alasan ingin mengambil jurusan Hukum hingga perjalanannya selama berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Selanjutnya untuk bagian kedua dan seterusnya berisikan perjalanan kehidupan Maria Ullfah setelah Kembali pulang ke Indonesia dan turut berjuang dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kedudukan wanita.

1.5.3 Interpretasi

Tahapan Interpretasi atau penafsiran sering kali disebut juga dengan bidang subjektivitas¹⁹. Tahapan ini dilakukan secara analisis dan sintesis yang mana dari sumber-sumber yang telah ditemukan dan dikumpulkan tersebut dianalisis kemudian ditemukan fakta-faktanya kemudian dirangkai dan dikelompokkan sesuai dengan konsep penelitian, setelahnya fakta-fakta tersebut disatukan kemudian dirangkai menjadi sebuah peristiwa sejarah baru.

Hal ini tentu saja memerlukan teori dan ilmu bantu dalam melakukan hal analisis dan sintesis tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis terhadap tokoh Maria Ulfah. Setelahnya penulis melakukan proses sintesis yaitu dengan mengumpulkan beberapa fakta-fakta tentang Maria Ulfah, kemudian melakukan pengelompokkan terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan lalu menyusunnya.

Dalam melakukan penyusunan fakta tersebut, penulis melakukan pendekatan dengan ilmu politik. Dikutip dari buku Sartono Kartodirdjo, ada sebuah pernyataan yang berbunyi: “Politik adalah Sejarah masa kini dan sejarah ada politik masa lampau”²⁰. Dengan pernyataan tersebut maka ilmu politik memiliki kaitan yang erat dengan sejarah yang mana dari keduanya jika diibaratkan mencakup keterlibatan antara peristiwa dan perilaku.

Menurut Kuntowijoyo dalam menulis sebuah catatan hidup tentang seseorang, meskipun sangat mikro namun dapat menjadikan bagian dalam mosaik sejarah yang lebih besar²¹. Dengan menuliskan biografi seorang tokoh dalam lingkup latar belakang, ataupun lingkungan sosial-politik, kita dapat memahami perilaku sejarah.

Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut dalam penelitian tentang Peran Maria Ulfah ini sebagai tokoh, maka penulis menggunakan teori pendekatan yaitu teori biografi (*biography theory*) yang dikemukakan oleh John A. Garraty. Garraty mengatakan bahwa biografi diawali dengan hal yang

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 79.

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 148.

²¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 203.

sederhana, yaitu *'the record of life'* atau catatan kehidupan²². Teori ini mengemukakan bahwa dalam penulisan biografi harus terdapat sesuatu tentang masa dimana subjeknya hidup yang mana bentuknya akan lebih dekat dengan sejarah.

John A. Garraty menuliskan bahwa dalam penulisan biografi sendiri pun tidak harus berurusan dengan fakta-fakta dan karir sejarah saja, namun berkaitan juga dengan apa yang telah dilakukan, mengapa melakukan hal tersebut, bagaimana zaman mempengaruhinya. Dengan kata lain bagaimana menggambarkan tokoh tersebut, baik dalam karakter maupun kepribadiannya dan individualitasnya²³.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kajian ini Peran Maria Ulfah dalam perpolitikan di Indonesia sesuai dengan teori tersebut yang mana dalam memimpin didasarkan atas keinginan dan kewibawaan dari pengaruh sosial. Dengan hal ini sosok Maria Ulfah muncul sebagai tokoh pembawa perubahan yang mana sosok ini muncul karena adanya masalah-masalah dan hal-hal yang melatarbelakangi yang akhirnya bertekad dan berkeinginan untuk membawa perubahan dan mampu mencerdaskan juga merubah keadaan masyarakat sekitar

1.5.4 Historiografi

Historiografi merupakan sebuah Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah setelah melewati beberapa Langkah sebelumnya. Dikutip dari buku M. Dien Madjid sejarah bukan hanya semata-mata sebuah kumpulan fakta-fakta tetapi sejarah merupakan sebuah cerita. Maksudnya sebuah kenyataan yang telah menjadi sebuah peristiwa.

Karena hal tersebut penulisan sejarah merupakan representasi sebuah kesadaran penulis sejarah dalam masanya. Maka sederhananya, historiografi merupakan sebuah cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil dari penelitian sejarah yang sebelumnya telah dilakukan²⁴. Berkaitan dengan

²² John A Garraty, "The Nature of Biography," *The Centennial Review of Arts & Science*, *SPRING XIII*, no. 1 (1957): 109–20, <http://www.jstor.org/stable/1344955> .

²³ *Ibid.*, 127.

²⁴ M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*.

pengertian tersebut penulis membuat rangkaian penulisan Historiografi, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II Biografi Maria Ulfah

Pada bab kedua dalam penelitian ini memuat bahasan tentang biografi Maria Ulfah yang terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dari riwayat hidup, latar belakang keluarga, dan latar belakang Pendidikan.

BAB III Peran Maria Ulfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia Tahun 1935-1973

Pada bab ketiga dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab terkait peran Maria Ulfah di Politik Indonesia. Untuk bagian-bagiannya diurutkan berdasarkan peran politik awal dari Maria Ulfah sesuai dengan periodisasi tahun, diantaranya Kongres Perempuan Indonesia II; III; dan IV, Kongres Bahasa Indonesia, anggota dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Kongres Wanita Indonesia, Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir, menjadi Sekretaris pada Kabinet-Kabinet yaitu, Kabinet Amir Sjarifuddin dan Kabinet Hatta, Konferensi Wanita Asia-Afrika sebagai perwakilan ketua delegasi dari KORWANI, peran akhirnya sebagai anggota Dewan Perimbangan Agung, dan dalam Bidang Sosial-Keagamaan.

BAB IV Penutup

Pada bagian keempat ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan sub bab kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas pada skripsi ini. Selanjutnya berisikan sub bab saran yang berisikan saran untuk penelitian lanjutan. Pada akhir penelitian dilengkapi dengan Lampiran dan juga daftar sumber yang telah penulis gunakan.